**Indikator Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Di Kabupaten Pelalawan**

## Febrian Abdullah a,\*, Rina Novia Yanti b,\*, Anto Ariyanto c,\*

Prodi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana

Universitas Lancang Kuning, Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ABSTRACT** |  | **ARTICLE HISTORY** |
| Global warming due to climate change has a negative impact on human life. Global warming is caused by increasing concentrations of greenhouse gases due to human activities such as burning fossil fuels and deforestation. The only surefire method to reduce greenhouse gas emissions today is to reduce consumption of energy and other resources. The research methodology uses interviews with stakeholders with descriptive analysis. From the results it was found that environmental conditions consisting of ecological aspects can be seen from the land, water quality and air, while the economic aspect can be seen from community income and social culture in Pelalawan Regency which is related to environmental management from the inner aspect in Pelalawan Regency. Efforts to protect and manage the environment in Pelalawan Regency consist of institutional aspects consisting of formal institutions such as Departments and informal institutions such as Non-Governmental Organizations and laws and regulations from the central to regional levels. |  | Received 29 Oktober 2023 Revised 30 Oktober 2023 Accepted 31 Oktober 2023 |
| **KEYWORDS** |
| Ecological aspect, Economic aspect, Social aspect. |

# Pendahuluan

Pemanasan global akibat terjadinya perubahan iklim membawa dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan. Satu-satunya metode yang pasti untuk mengurangi emisi gas rumah kaca saat ini adalah dengan mengurangi konsumsi energi dan sumber daya lainnya.

Pemanasan global tersebut dapat dimitigasi dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Kabupaten Pelalawan mempunyai posisi yang strategis di Provinsi Riau, sebab berada pada arus lintas timur Sumatera yang padat dan terhubung langsung ke arus perlintasan dagang Selat Malaka.

Lebih lanjut BBSDLP (2019) menyatakan bahwa posisi strategis dan kondisi lahan yang relatif datar mendukung pemanfaatan sumber daya untuk berbagai jenis penggunaan lahan terutama hutan tanaman industri monokultur akasia/ekaliptus, perkebunan kelapa sawit, pertanian tanaman pangan (palawija, sayur, dan buah-buahan), dan permukiman. Kabupaten Pelalawan juga masih menyimpan potensi hutan berupa kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan, kawasan lindung setempat dan cadangan pengembangan hutan tanaman industri atau hutan produksi.

Berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan memerlukan upaya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan terstruktur, sehingga dapat lestari dalam jangka waktu panjang. Pengelolaan ini biasanya berbasis ekoregion. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asili, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan sistem alam dan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang umum terjadi di setiap kabupaten termasuk di Kabupaten Pelalawan. Permasalahan ini dapat dipecahkan melalui rumusan-rumusan permasalahan terkait dengan indikator-indikator pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan indikator lingkungan hidup belum tersusun secara sistematis dan masih bersifat parsial untuk kepentingan setiap instansi pemerintah di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun indikator pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Pelalawan dengan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi lingkungan yang terdiri dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya di Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup
2. Menganalisis data-data yang terkait upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi peneliti, memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai indikator pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bagi pembuat kebijakan atau Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat khususnya untuk pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun dan dirumuskan.

# Metode Penelitian

**Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lokasi penelitian berada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras dan Bandar Seikijang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Desember 2023.

**Alat dan Bahan**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi software *Microsoft Excel* 2010 dan software *Microsoft Word* 2010. Sedangkan perangkat keras yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis, laptop dan *handphone*/kamera. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data primer mengenai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

**Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional yaitu penelitian yang menggambarkan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang ada. Pendekatan penelitian ini secara umum merupakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian jika dibandingkan jika menggunakan pendekatan lain.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder, pengumpulan data primer melalui kuesioner/ angket, pengamatan (observasi) dan wawancara *(interview)* dan dokumentasi.

**Teknik Analisis Data**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis beberapa variabel yang diteliti (sumber daya manusia, keuangan/rencana anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup, peraturan/regulasi, peran serta masyarakat) dengan berpedoman pada beberapa persyaratan atau teori yang umum digunakan. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) teknik analisis yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini.

# Pembahasan

**Kondisi Umum Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 134.087.200 Ha (13.408,72 km2). Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 118 desa/kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 4.321,64 km2 (32,23 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 223,45 km2 atau 1,67 % dari luas Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara (LU) sampai 0,20' Lintang Selatan (LS) dan antara 100,42' Bujur Timur (BT) sampai 103,28' Bujur Timur (BT). Kondisi geografis Kabupaten Pelalawan yang terbentang dari pesisir timur sumatera yang relatif datar dengan tanah gambut sampai ke pedalaman sumatera yang relatif berbukit serta dibelah oleh keberadaan Sungai Kampar memiliki beberapa pulau kecil dan terdapat bagian laut seluas 0,666 km2.

**Kondisi Sosial Ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap stakeholder yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terkait dengan pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. Komponen Ekonomi/Komponen yang Mempengaruhi Pengelolaan Lingkungan Hidup**

| **No** | **Aktivitas Ekonomi Utama** | **Sumbangan terhadap PDRB Daerah (miliar rupiah) Tahun 2022** | **Potensi Dampak Negatif terhadap Kehati** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2.693,19 | Sedang | Sumber kebakaran hutan, pencemaran akibat penggunaan bahan kimia |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1.591,99 | Besar | Perubahan bentang alam |
| 3 | Industri Pengolahan | 32.218,37 | Besar | Penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran dan perusakan ekosistem |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 24,28 | Kecil | Pembukaan lahan kecil, radiasi |
| 5 | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 3,27 | Kecil |  |

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa lima sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Berdasarkan data perkembangan PDRB bila dilihat dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pelalawan pada seri tahun 2010 hingga tahun 2022 berdasarkan harga konstan sebesar 38.141,09 miliar rupiah atau 4,39 %. Komponen kontribusi dari PDRB yang mempengaruhi pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam lestari, berdasarkan potensi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati yang terbesar/tinggi pada pertambangan dan penggalian meskipun kontribusi pada PDRB kecil dan yang sedang pada industri pengolahan.

**Kondisi Budaya**

Budaya Melayu sudah mengakar dan mendarah daging dalam masyarakat Kabupaten Pelalawan, baik yang berdomisili di daerah pesisir sepanjang aliran Sungai Kampar, atau disebut Melayu Pesisir maupun di daerah daratan yang disebut Melayu Petalangan. Dua daerah penopang terjaganya khazanah budaya Melayu di negeri Seiya sekata tanah Pelalawan ini masih istiqomah mempertahankan tradisi tradisi lokal yang sudah turun temurun dilaksanakan dari generasi ke generasi anak jati Melayu Pelalawan.

Tarian persembahan merupakan budaya Melayu yang tak lekang oleh zaman, tarian selamat datang untuk menyambut para petinggi negeri masih lestari hingga kini. Sebagai perwujudan cita-cita luhur membangun peradaban yang berkesinambungan dari generasi ke generasi, yang mayoritas penduduknya orang Melayu beragama Islam, termasuk didalamnya orang pebatinan Kurang Aso Tigo Puluh atau pebatinan Petalangan, suku yang bermukim di wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, Kuala Kampar dan Kecamatan Pelalawan tepatnya di hutan pedalaman sungai Kampar. Berikut disajikan beberapa kelompok masyarakat (kedatuan dan perbatinan) yang ada di Kabupaten Pelalawan.

**Kondisi Ekologi**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap stakeholder yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terkait dengan pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. Ikhtisar Luas kawasan lindung Kabupaten Pelalawan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kecamatan** | **HL****(Ha)** | **Gb****(Ha)** | **TN****(Ha)** | **SM****(Ha)** | **Bk****(Ha)** | **SS****(Ha)** | **SP****(Ha)** | **Jumlah****(Ha)** |
| 1. | Bandar Seikijang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Pangkalan Kerinci | 390,22 | - | - | - | - | 449,57 | - | 839,80 |
| 3. | Langgam | 26,81 | - | 21.082,69 | - | - | 1.232,13 | - | 22.341,63 |
| 4. | Pelalawan | 277,28 | 1.952,65 | - | *0,56* | - | 1.457,77 | - | 3.688,25 |
| 5. | Pangkalan Kuras | - | - | 33.642,76 | - | - | 126,03 | - | 33.768,79 |
| 6. | Bunut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Bandar Petalangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Pangkalan Lesung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Ukui | - | - | 46.767,74 | - | - | - | - | 46.767,74 |
| 10. | Kerumutan | - | - | - | 17.658,49 | - | 52,47 | - | 17.710,96 |
| 11. | Teluk Meranti | 4.294,51 | 143.623,00 | - | 19.469,24 | - | 2.123,98 | - | 169.510,73 |
| 12. | Kuala Kampar | 655,89 | 9.774,24 | - | - | 1.399,14 | 74,66 | 989,90 | 12.893,83 |
| Kab. Pelalawan | 5.644,71 | 155.349,89 | 101.493,19 | 37.128,30 | 1.399,14 | 5.516,60 | 989,90 | 307.521,73 |

Sumber: Perhitungan secara digitasi pada Peta Pola Ruang Wilayah Kab. Pelalawan.

*Keterangan:*

**HL** = Hutan Lindung

**Gb** = Kawasan Bergambut

**TN** = Taman Nasional

**SM** = Suaka Margasatwa

**Bk** = Kawasan Pantai Berhutan Bakau

**SS** = Sempadan Sungai

**SP** = Sempadan Pantai

Kondisi ekologi Kabupaten Pelalawan adalah kawasan hutan, yang meliputi baik hutan yang merupakan kawasan lindung (Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Kawasan Bergambut) maupun kawasan budidaya (yang meliputi Hutan Produksi dan Hutan Rakyat). Selain itu, dengan karakternya yang bervegetasi, maka secara normatif kawasan budidaya bervegetasi (perkebunan rakyat dan perkebunan besar), wilayah resapan air, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan sekitar danau, ruang terbuka hijau perkotaan, hutan rakyat, pertanian, kawasan hortikultur, dan kawasan pertenakan yang masing-masing kawasan telah dideliniasi dan memiliki luasan yang beragam.

**Tabel 3. Jenis Kawasan Budidaya dan Kriterianya**

| **No** | **Jenis Kawasan Budidaya** | **Kriteria** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) | Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat). Catatan: Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap ini dapat diusahakan dengan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). |
| 2. | Kawasan Hutan Rakyat (HR) | Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik. Dengan demikian merupakan kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut. |
| 3. | Kawasan Peruntukan Pertanian (Pt): |
| a. | Kawasan Pertanian Tanaman Pangan | a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan (lahan basah dan lahan kering)b. Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.c. Mendukung ketahanan pangan nasional umumnya dan daerah pada khususnya.d. Dapat dikembangkan sebagai kegiatan pertanian campuran (*mixed farming*) pada lokasi-lokasi yang sesuai dan memungkin, seperti campuran dengan peternakan, kebun campuran, dan lain-lain. |
| b. | Kawasan Perkebunan | a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian hortikultura.b. Dapat dikembangkan sebagai kegiatan pertanian campuran (*mixed farming*) pada lokasi-lokasi yang sesuai dan memungkin, seperti pertanian tanaman pangan, permukiman (lahan pekarangan). |
| c. | Kawasan Peruntukan Perkebunanc1. Kawasan Perkebunan Rakyat (PbR)c2. Kawasan Perkebunan Besar (PbB) | a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan.b. Dikembangkan dengan sistem monokultur atau satu jenis tanaman utama. Kawasan perkebunan yang diusahakan oleh rakyat, dengan skala yangrelatif kecil, yang dapat juga merupakan plasma (*small estate*) dalam pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Kawasan perkebunan yang diusahakan dengan skala yang relatif besar oleh perusahaan/badan usaha (swasta atau milik negara). |
| d. | Kawasan Peternakan | a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan peternakan, yaitu tersedia pakan, ruang pemeliharaan dan penggembalaan.b. Dapat dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan pertanian campuran (*mixed farming*) pada kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat. |
| 4. | Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi | a. Memiliki nilai strategis nasional, terdiri atas pertambangan mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, dan air tanah.b. Ada penetapan WP (Wilayah Pertambangan) yang disertai penetapan turunannya berupa:-WUP (Wilayah Usaha Pertambangan),-WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat),-WPN (Wilayah Pencadangan Nasional); yang berkenaan dengan kawasan tersebut. |
| 5. | Kawasan Peruntukan Industri | a. Kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, berupa: estat industri (*industrial estate*), zona industri, atau sentra industri.b. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.c. Tidak mengubah atau mengalihfungsi lahan produktif. |
| 6. | Kawasan Peruntukan Pariwisata | a. Memiliki objek dengan daya tarik wisata, berupa alam dan budaya.b. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan pelestarian lingkungan. |
| 7. | Kawasan Peruntukan Permukiman | a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana.b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan.c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. |
|  | 1. Kawasan Permukiman Perkotaan
 | Kawasan permukiman yang terletak pada kawasan perkotaan, yaitu yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian. |
|  | 1. Kawasan Permukiman Perdesaan
 | Kawasan permukiman yang terletak pada kawasan perdesaan, yaitu yang mempunyai kegiatan utama pertanian. |
| 8. | Kawasan Peruntukan Lainnya | Kriteria untuk kawasan peruntukan lainnya disesuaikan dengan karakter khusus peruntukan yang bersangkutan. |

**Upaya-upaya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pelalawan**

**Perencanaan dan Kebijakan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap stakeholder terdapat beberapa perencanaan wilayah dan lingkungan terkait kerusakan lingkungan hidup, yaitu: pada daerah pesisir tidak ada perencanaan, adanya perencanaan tataguna hutan mangrove, adanya perencanaan tataguna hutan gambut dan adanya perencanaan tataguna lahan. Beberapa kebijakan dan program mengenai kerusakan lingkungan hidup disesuaikan dengan tingkatannya, yaitu: tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Kebijakan tingkat nasional yaitu PP, UU dan Perpu. Kebijakan tingkat provinsi yaitu peraturan daerah di tingkat provinsi. Kebijakan tingkat kabupaten yaitu peraturan bupati. tipe peraturan lingkungan hidup untuk tingkat nasional diatur berdasarkan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten selain undang - undang diatasnya juga diatur berdasarkan peraturan gubernur dan peraturan bupati.

**Peran lembaga dan peraturan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup**

Terdapat beberapa koordinasi dan prosedur dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: koordinasi antar lembaga, pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik, kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik, kelompok kerja dalam pengelolaan lingkungan hidup telah dilakukan, kelompok konsultasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terlaksana. Beberapa peran lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: penggunaan media komunikasi atau penyuluhan sudah dilaksanakan, Training/pelatihan sudah dilaksanakan, kearifan lokal terlaksana. Peraturan yang mendukung dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah UU 32 Tahun 2009, PP 22 Tahun 2021, UU 11 Tahun 2020 dan UU 18 Tahun 2008.

**Jenis Lembaga dan Indikator Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Beberapa jenis lembaga yang terlibat dalam pengelolaan, yaitu: lembaga dalam kepemerintahan (formal) yaitu dinas lingkungan hidup dan lembaga diluar kepemerintahan (informal) yaitu LSM. Beberapa LSM yang terdapat di Kabupaten Pelalawan atau mempunyai kegiatan di Kabupaten Pelalawan adalah Yayasan Tesso Nilo, Jaringan Masyarakat Gambut Riau. Ada indikator pengelolaan lingkungan hidup yaitu indeks kualitas Lingkungan Hidup.

**Upaya dalam Menjaga Lingkungan Hidup**

Perusahaan yang menyebabkan kerusakan bersedia mengganti rugi jika terjadi kerusakan, ganti rugi yang dapat berupa material seperti uang atau barang dan bisa berbentuk kegiatan seperti penanaman kembali, reboisasi. Hal ini menjadikan semua pihak sangat memahami tentang fungsi lingkungan hidup. Sangat perlu untuk mempertahankan kualitas lingkungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan manusia, serta untuk memerangi perubahan iklim.

**Indikator-indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan**

**Indikator Ekologi**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap stakeholder yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terkait dengan pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. Indikator Ekologi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban responden** | **Biofisik** | **Tutupan vegetasi dan keanekaragaman jenis pohon** | **Fauna** | **Permasalahan lingkungan dan Upaya perlindungan** |
| 1 | 40% | Curah hujan Normal, tata guna lahan | Akasia, kelapa, perkebunan karet, kelapa sawit, rambutan, durian | Biawak, ular, burung | Persampahan dan upayanya reboisasi, perbaikan |
| 2 | 35% | Curah hujan Lebat, tata guna lahan  | Akasia, kelapa, perkebunan karet, kelapa sawit, rambutan, durian | Biawak, ular, kera, burung pipit, burung punai | Sampah, perubahan fungsi lahan dan upayanya Reboisasi  |
| 3 | 25% | Curah hujan Lebat, tata guna lahan | Perkebunan karet, Sawit, ladang  | Kera, ular hijau, biawak, burung, kodok | Banjir, sampah, perubahan fungsi lahan |

Dari hasil wawancara bahwa responden menyatakan curah hujan, tutupan vegetasi dan keberadaan jenis fauna sebagai indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Alikodra (2018) juga menambahkan bahwa untuk kepentingan pengelolaan suatu habitat diperlukan analisis terhadap berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan habitat. Faktor-faktor yang dapat merubah kuantita dan kualita habitat terdiri dari bencana alam, kegiatan manusia (eksploitasi hutan, pembukaan hutan untuk berbagai keperluan, pembuatan bendungan, pengeringan rawa dan sebagainya), kebakaran hutan, penggembalaan ternak dan pencemaran bahan-bahan kimia.

**Indikator Ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap stakeholder yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terkait dengan pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5. Indikator Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban responden** | **Potensi ekonomi lingkungan** | **Ketersediaan dana pengelolaan lingkungan** | **Pendapatan masyarakat dari lingkungan** | **Peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja terkait pengelolaan lingkungan** |
| 1 | 50% | Baik | Kurang, masih harus ditingkatkan | Potensi bagus | Berpeluang |
| 2 | 35% | Potensi bagus, realisasi kurang | Bank sampah, budidaya madu sialang, budidaya magot. | potensi cukup besar | Berpeluang |
| 3 | 15% | Baik | Kurang, masih harus ditingkatkan | Potensi Bagus | Berpeluang |

Berdasarkan tabel yang menjadi indikator pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari keberadaan dana, potensi ekonomi dari lingkungan, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja dari pengelolaan lingkungan. Menurut Nurhamidah dan Suwandana (2023) menyatakan bahwa perkembangan kualitas lingkungan yang tidak menentu serta potensi kegiatan ekonomi yang mengancam kelestarian lingkungan membuat kualitas lingkungan provinsi di Pulau Sumatera memerlukan perhatian lebih.

**Tabel 6. Indikator Sosial Budaya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jawaban responden** | **Komitmen stakeholder dalam pengelolaan lingkungan**  | **Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan**  | **Pemberdayaan dan edukasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan**  | **Potensi konflik dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan** |
| 1 | 50% | Cukup, perlu di tingkatkan | Cukup | Pelatihan | Kecil |
| 2 | 35% | Baik | Cukup, masih ada masyarakat yang apatis | Berupa sosialisasi | Kecil |
| 3 | 15% | Cukup, perlu di tingkatkan | Cukup | Pelatihan | Pernah terjadi |

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa komitmen stakeholder, keterlibatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan potensi konflik merupakan indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Kurniawan *et al* (2015) menyatakan bahwa karakteristik sumbangan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, dibandingkan memberikan bantuan dalam bentuk uang, pemikiran atau yang lain.

# Kesimpulan

Kondisi lingkungan yang terdiri dari aspek ekologi dapat dilihat dari lahan, kualitas air, udara sedangkan secara aspek ekonomi dilihat dari pendapatan masyarakat dan sosial budaya di Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dari aspek batin yang terdapat di Kabupaten Pelalawan.

Upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan terdiri dari aspek kelembagaan yang terdiri dari kelembagaan formal seperti Dinas dan kelembagaan informal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai daerah.

**Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlah membantu penulisan ini, terutama pihak bank Sampah Unilak.

**Daftar Pustaka**

Alikodra, HS. 2018. Pengelolaan Satwa Liar. PAU IPB.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan dan Pertanian. 2019. Laporan Tahunan BBSDLP 2019. Inovasi Teknologi Sumber Daya Lahan Untuk Pertanian Berkelanjutan. Kementerian Pertanian

BPS [Badan Pusat Statistik] Kabupaten Pelalawan. 2022. Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, Pelalawan.

BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah] Kabupaten Pelalawan. 2022. Luas Wilayah Terjadinya Kebakaran Lahan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022. BPBD Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci

Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2022. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. 2021. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2031. Pemkab Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 62 ayat 1-3.